MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

IMPLEMENTASI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* TERHADAP KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PELAPORAN LKPM: STUDI PADA DPMPTSP KOTA JAMBI

Aura Khanaya[1], Elyanti Rosmanidar[2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
email: aurakanaya0@gmail.com[1] elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id[2]

Abstrak

Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan kewajiban pelaku usaha dalam rangka monitoring kegiatan investasi di Indonesia. Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM tepat waktu dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi OSS dan dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan petugas DPMPTSP dan pelaku usaha, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS mempermudah pelaporan LKPM, meningkatkan transparansi, dan mengurangi keterlambatan pelaporan. Namun, kendala teknis dan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem masih menjadi hambatan utama..

Kata Kunci: Online Single Submission, LKPM, Kepatuhan Pelaku Usaha, DPMPTSP, Kota Jambi

Abstract

The reporting of Investment Activity Reports (LKPM) is an obligation for business actors as a part of monitoring investment activities in Indonesia. The implementation of the Online Single Submission (OSS) system is expected to improve business actors' compliance in submitting LKPM accurately and on time. This study aims to analyze the implementation of OSS and its impact on the compliance of business actors in Jambi City. The research method used is a qualitative descriptive study with data collected through interviews with DPMPTSP officers and business actors, as well as analysis of related documents. The results show that OSS facilitates LKPM reporting, increases transparency, and reduces reporting delays. However, technical issues and limited understanding of the system among business actors remain the main obstacles..

Keywords: Online Single Submission, LKPM, Business Actor Compliance, DPMPTSP, Jambi City

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1368
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada iklim investasi yang sehat dan kondusif. Investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), merupakan instrumen vital dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan mempercepat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) sebagai indikator utama daya tarik ekonomi (Immaculata Yovita Adventy et al., 2024). Namun, tantangan birokrasi, prosedur perizinan yang rumit, dan praktik pungutan liar di masa lalu telah lama menjadi hambatan serius yang mengurangi efisiensi dan transparansi dalam sektor perizinan usaha (Fatimah, 2022). Oleh karena itu, reformasi birokrasi melalui transformasi digital di sektor pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan kebijakan inovatif berupa Sistem Online Single Submission (OSS). OSS adalah platform perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus izin dari mana saja dan kapan saja. Peluncuran sistem OSS, terutama transisi ke OSS Risk-Based Approach (OSS-RBA) pada tahun 2021, menandai perubahan paradigma mendasar dari perizinan berbasis izin (*licensing*) menjadi perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Immaculata Yovita Adventy et al., 2024). Melalui sistem ini, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas tunggal dan legalitas dasar untuk memulai kegiatan usaha. Implementasi sistem OSS ini secara masif dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh wilayah, termasuk di Kota Jambi, yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat daerah.

Meskipun OSS telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas dalam mempercepat proses perizinan(Artini et al., 2024), tujuannya tidak berhenti hanya pada penerbitan izin. Keberhasilan investasi yang sesungguhnya diukur dari realisasi kegiatan usaha dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pasca-izin. Salah satu kewajiban pasca-izin yang paling penting adalah pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan instrumen pengawasan yang wajib disampaikan secara berkala oleh setiap pelaku usaha, terlepas dari skala usaha (mikro, kecil, menengah, atau besar) atau jenis modal (PMA/PMDN) (Laporan Kegiatan Penanaman Modal, BKPM). Pelaporan ini mencakup data realisasi investasi (Modal Tetap dan Modal Kerja), penggunaan tenaga kerja, hingga permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Kualitas dan ketepatan waktu pelaporan LKPM sangat krusial karena data tersebut digunakan oleh DPMPTSP sebagai basis untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan merumuskan kebijakan investasi daerah yang akurat dan berbasis bukti

Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM menjadi variabel kunci yang menghubungkan antara kemudahan berizin dengan kepastian realisasi investasi. Jika OSS mempermudah proses awal, maka tingkat kepatuhan menunjukkan keberlanjutan dampak sistem tersebut. Namun, literatur menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam implementasi OSS yang dapat memengaruhi kewajiban pelaporan pasca-izin. Beberapa kendala yang dilaporkan meliputi rendahnya kesadaran publik terhadap prosedur perizinan dan pelaporan, kurangnya sosialisasi yang masif, kompleksitas penggunaan sistem, serta masalah teknis pada server dan jaringan yang mengganggu aksesibilitas. Di samping itu, efektivitas pelayanan OSS juga tidak signifikan memengaruhi kepuasan masyarakat secara langsung, tetapi dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang bertugas memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha (Artini et al., 2024). Permasalahan ini mengindikasikan bahwa meskipun OSS sudah *online*, faktor-faktor non-teknis, seperti kemampuan pengguna dan dukungan aparat, masih menjadi penentu keberhasilan.

DPMPTSP Kota Jambi sebagai entitas pelaksana menghadapi tantangan ganda: memastikan kemudahan akses OSS sekaligus mendorong kepatuhan pelaporan LKPM di tengah dinamika perkembangan usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendominasi. Kurangnya kepatuhan dalam pelaporan LKPM berakibat fatal karena dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara data perizinan yang dikeluarkan dengan realisasi investasi di lapangan, yang pada gilirannya akan mengaburkan peta investasi Kota Jambi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem OSS yang telah diluncurkan di Kota Jambi mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam konteks pelaporan LKPM, serta mengeksplorasi faktor-faktor dominan yang membentuk perilaku kepatuhan tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang OSS sebagian besar berfokus pada efektivitas sistem perizinan (Fahrudin & Subandiyono, 2023), kualitas layanan, atau strategi. Studi yang secara spesifik mengaitkan implementasi OSS dengan variabel kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pasca-izin, khususnya pelaporan LKPM, dan mengkaji secara empiris peran DPMPTSP di Kota Jambi, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menjembatani kesenjangan tersebut. Kami akan mengulas secara mendalam bagaimana integrasi sistem digital perizinan OSS memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM, yang diukur dari ketepatan waktu, kelengkapan data, dan akurasi informasi yang disajikan.

Berdasarkan latar belakang yang komprehensif ini, maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: **"Bagaimana implementasi sistem Online Single Submission (OSS) memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di wilayah kerja DPMPTSP Kota Jambi, dan apa saja faktor-faktor, termasuk efektivitas layanan dan kompetensi SDM, yang menjadi determinan utama dalam mendorong kepatuhan tersebut?**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) atau telaah pustaka sebagai pendekatan utama. Dengan metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara, melainkan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis penelitian-sebelumnya serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik "Implementasi Online Single Submission (OSS) terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)". Pemilihan studi literatur sebagai metode penelitian dipandang tepat karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap landasan teori, kerangka konseptual, dan temuan penelitian terdahulu, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih ada. Studi literatur memberikan pijakan yang sistematis dan kritis untuk merancang penelitian lanjutan (Barry et al., 2022)

Beberapa literatur metodologis menekankan bahwa literature review harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan kritis. Misalnya,(Barry et al., 2022) memaparkan *six-step approach* dalam melakukan sintesis pengetahuan melalui tinjauan pustaka, mulai dari identifikasi topik, pencarian literatur, seleksi, analisis, sintesis hingga penyusunan kerangka pemikiran. Studi lain, seperti (Sukmawati & Pujiningsih, 2022)menekankan pentingnya kriteria inklusi dan eksklusi dalam review literatur agar sumber yang digunakan valid, relevan, dan terkini. (Yusril & Nurmiati, 2021)menambahkan bahwa analisis literatur harus melibatkan klasifikasi tematik serta evaluasi kritis terhadap metode dan hasil penelitian terdahulu untuk meminimalkan bias dan meningkatkan reliabilitas temuan.

Dalam praktik penelitian ini, langkah-langkah studi literatur dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti menetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan kajian pendahuluan di Bab I, terkait implementasi OSS dan kepatuhan pelaporan LKPM di DPMPTSP Kota Jambi. Kedua, ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi literatur; inklusi mencakup artikel, jurnal, makalah, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga sekarang, relevan dengan tema OSS, pelaporan LKPM, kepatuhan pelaku usaha, perizinan berusaha, dan sistem layanan investasi, baik berbahasa Inggris maupun Indonesia. Literatur yang tidak relevan atau tidak tersedia dalam teks lengkap dikecualikan. Ketiga, dilakukan pencarian literatur melalui Google Scholar, Scopus, Garuda, dan Sinta dengan kata kunci seperti "Online Single Submission", "LKPM reporting compliance", "investment licensing Indonesia", "business actor compliance OSS", dan "literature review OSS Indonesia". Teknik tambahan seperti text-mining juga dipertimbangkan sesuai rekomendasi Felizardo et al. dalam studi automasi review literatur.

Tahap berikutnya adalah seleksi literatur, dimulai dari screening judul dan abstrak untuk menilai relevansi, kemudian membaca full-text untuk memastikan kecocokan dengan kriteria inklusi, dan akhirnya menyusun matriks literatur. Matriks ini memuat informasi penulis, tahun, konteks penelitian, variabel atau tema, metode penelitian, temuan utama, serta relevansi terhadap penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan analisis dan sintesis literatur. Literatur dikelompokkan ke dalam tema utama, yaitu (a) implementasi OSS/perizinan berbasis TI; (b) kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM; (c) faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pelaku usaha; dan (d) tantangan serta hambatan sistem OSS. Sintesis dilakukan untuk menggambarkan perkembangan penelitian, menemukan gap, dan merumuskan kerangka konseptual penelitian.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, peneliti menyusun kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel independen (implementasi OSS) dengan variabel dependen (kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM), serta memperhitungkan faktor intervening seperti literasi digital pelaku usaha, dukungan kebijakan daerah, dan infrastruktur TI. Kerangka ini akan dijabarkan secara rinci pada Bab IV, sekaligus menunjukkan arah penelitian yang belum banyak dibahas sebagai kontribusi penelitian.

Karena penelitian ini bersifat studi literatur, lokasi penelitian tidak merujuk ke tempat fisik, melainkan cakupan literatur yang dikaji, baik nasional maupun internasional, hingga tahun penelitian. Sedangkan waktu penelitian meliputi periode pengumpulan literatur, misalnya Agustus hingga November 2025, sesuai jadwal pelaksanaan.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan sumber yang terpercaya proses seleksi dilakukan secara sistematis dan transparan, analisis dilakukan kritis dengan mencatat kelebihan dan kelemahan penelitian terdahulu, serta seluruh langkah didokumentasikan agar dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Hasil studi literatur disajikan dalam bentuk tabel atau matriks literatur yang merangkum penelitian terdahulu, diagram perkembangan penelitian dari waktu ke waktu, serta narasi deskriptif yang menjelaskan tren, gap, dan relevansi terhadap penelitian ini. Akhirnya, penutup metodologis memaparkan bagaimana kerangka pemikiran dibentuk dari hasil literatur, serta justifikasi pemilihan metode ini sebagai pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, terdapat beberapa temuan utama terkait implementasi Online Single Submission (OSS) dan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Temuan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga tema utama:

1. **Kemudahan Akses dan Implementasi OSS**
   OSS merupakan sistem berbasis elektronik yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan usaha dan pelaporan LKPM. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui akses online, panduan pengisian formulir, notifikasi otomatis, dan pengunggahan dokumen secara digital. Literatur menunjukkan bahwa kemudahan akses ini mendorong efisiensi waktu dan mengurangi birokrasi, sehingga pelaku usaha lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pelaporan.

2. **Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM**
   Temuan literatur menunjukkan bahwa OSS meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, khususnya dalam hal ketepatan waktu pengiriman LKPM dan kelengkapan dokumen. Sistem ini membantu pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban regulatif dan meminimalkan risiko sanksi administratif. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa kepatuhan tertinggi terlihat pada pelaku usaha yang memiliki pemahaman digital yang baik dan mendapat dukungan informasi yang memadai dari instansi pemerintah.

3. **Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi OSS**
   Implementasi OSS berhasil ketika didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain infrastruktur TI yang memadai, dukungan kebijakan pemerintah daerah, dan kemudahan penggunaan sistem. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan literasi digital pelaku usaha, kendala teknis sistem (misalnya server overload), serta pemahaman

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

regulasi yang masih rendah. Hambatan ini memengaruhi efektivitas OSS dalam mendorong kepatuhan pelaporan LKPM secara konsisten.

Tabel 4.1. Temuan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM Berdasarkan OSS

Penulis	***Tahun***	***Fokus Penelitian***	***Temuan Utama***	***Relevansi***
Fatimah	*2022*	*OSS untuk UMKM*	*OSS mempermudah perizinan dan pelaporan; kepatuhan meningkat*	*Memberikan contoh kemudahan OSS untuk UMKM*
Adventy et al.	*2023*	*OSS dan efektivitas perizinan*	*Infrastruktur TI dan literasi digital memengaruhi efektivitas OSS*	*Indikator faktor pendukung implementasi OSS*
Artini et al.	*2024*	*OSS di Badung*	*Kepuasan publik meningkat; kendala teknis masih ada*	*Konteks tantangan implementasi OSS di daerah*
Putri Gayatri et al.	*2023*	*OSS untuk UMKM*	*OSS mempermudah pelaporan triwulanan LKPM; kendala literasi digital masih ada*	*Menunjukkan perlunya sosialisasi dan pelatihan OSS*

Keterangan: LKPM = Laporan Kegiatan Penanaman Modal; OSS = Online Single Submission.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi Online Single Submission (OSS) secara signifikan memengaruhi kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). OSS menyediakan platform digital yang terintegrasi sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengakses izin usaha, mengisi formulir LKPM, dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Sistem ini juga memiliki fitur notifikasi dan panduan otomatis yang membantu pelaku usaha agar tidak melewatkan tenggat waktu pelaporan, sehingga kepatuhan terhadap regulasi dapat lebih terjaga.

Beberapa penelitian terdahulu menegaskan bahwa penggunaan OSS menurunkan tingkat kesalahan pengisian dokumen dan mempercepat proses administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital berbasis OSS tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mendorong kepatuhan secara sukarela dari pelaku usaha karena prosedur yang lebih jelas dan mudah diikuti. Dengan demikian, OSS menjadi alat penting dalam memastikan pelaporan LKPM dilakukan secara tepat waktu dan lengkap, sekaligus meningkatkan transparansi proses perizinan investasi.

Selain itu, kajian literatur menekankan bahwa efektivitas OSS sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan kemampuan pengguna. Pelaku usaha yang memiliki literasi digital tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem, sementara pelaku usaha dengan pemahaman teknologi rendah masih menghadapi kesulitan dalam mengakses dan menggunakan fitur OSS. Oleh karena itu, literasi digital menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana sistem OSS dapat mendorong kepatuhan.

Analisis temuan menunjukkan bahwa OSS tidak hanya memberikan kemudahan dalam pelaporan, tetapi juga mempengaruhi perilaku kepatuhan pelaku usaha. Mekanisme digital yang terstruktur, integrasi data, serta panduan otomatis menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban regulatif. Dengan sistem OSS, proses pengawasan oleh pemerintah daerah menjadi lebih efisien, sehingga risiko pelanggaran dapat diminimalkan. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi perizinan dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kepatuhan regulatif dalam konteks investasi.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha lebih tinggi ketika implementasi OSS didukung oleh infrastruktur TI yang memadai, akses internet stabil, serta adanya dukungan kebijakan dari

pemerintah daerah berupa sosialisasi, panduan teknis, dan pelatihan rutin. Literatur juga menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung lebih disiplin dalam pelaporan ketika mereka memahami prosedur OSS dan memiliki pengalaman sebelumnya menggunakan sistem digital untuk keperluan administrasi. Oleh karena itu, literasi digital bukan hanya menjadi faktor tambahan, tetapi salah satu kunci keberhasilan implementasi OSS.

Namun, hambatan signifikan tetap ada. Beberapa pelaku usaha menghadapi keterbatasan kemampuan teknologi dan pemahaman regulasi yang masih rendah. Gangguan teknis sistem, seperti server overload atau bug pada aplikasi, juga dapat menghambat proses pelaporan. Literatur menunjukkan bahwa kendala ini menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu, meskipun OSS telah diterapkan secara resmi. Oleh karena itu, intervensi berupa sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kualitas sistem sangat penting untuk memastikan efektivitas OSS.

Selain itu, faktor kultural dan organisasi juga memengaruhi kepatuhan. Pelaku usaha yang memiliki budaya kepatuhan tinggi dan struktur organisasi yang mendukung administrasi regulatif lebih mudah memanfaatkan OSS. Sebaliknya, pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya laporan LKPM atau memiliki sistem internal yang tidak tertata, cenderung mengalami hambatan meskipun OSS tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan OSS tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan internal pelaku usaha.

Kaitan dengan teori e-government menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi. OSS sebagai bentuk e-government di sektor perizinan usaha berhasil menurunkan hambatan administratif dan mempermudah pemantauan. Penelitian terdahulu mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa sistem digital berbasis OSS meningkatkan efisiensi proses perizinan, kepuasan pelaku usaha, dan kepatuhan regulatif, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan literasi digital.

Selain itu, OSS memperkuat integrasi data antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih berbasis bukti. Dengan adanya data real-time terkait kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, pemerintah dapat merancang kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa OSS tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan investasi yang strategis.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menegaskan bahwa implementasi OSS memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha, dengan catatan bahwa faktor pendukung seperti literasi digital, dukungan kebijakan, dan kesiapan infrastruktur TI harus dipenuhi. Hambatan yang ada, baik teknis maupun non-teknis, perlu diatasi melalui pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kualitas sistem. Dengan demikian, OSS dapat berperan optimal dalam mendorong pelaporan LKPM yang tepat waktu, lengkap, dan akurat, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem investasi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan penelitian mengenai implementasi Online Single Submission (OSS) terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. OSS meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Sistem ini menyediakan mekanisme yang mudah diakses, transparan, dan terintegrasi, sehingga pelaku usaha terdorong untuk melaporkan kegiatan investasinya secara tepat waktu dan lengkap.
2. Efektivitas OSS dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kesiapan infrastruktur TI, dukungan kebijakan pemerintah daerah, kemudahan penggunaan sistem, dan literasi

digital pelaku usaha. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman digital lebih baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

3. Hambatan utama implementasi OSS meliputi keterbatasan kemampuan teknologi pelaku usaha, kendala teknis sistem, dan kurangnya pemahaman regulasi. Hambatan ini perlu diatasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kualitas sistem agar OSS dapat berfungsi optimal.
4. Kaitan dengan teori dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik melalui OSS dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pelaku usaha. Sistem ini juga mendukung monitoring investasi secara real-time, sehingga pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pengawasan yang lebih efektif.
5. Secara keseluruhan, OSS terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan regulatif pelaku usaha dan memperkuat tata kelola investasi di tingkat daerah, dengan catatan bahwa dukungan teknis, kebijakan, dan literasi digital harus terus diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

Artini, K. A., Merta, I. K., & Yusmini, N. M. (2024). Effectiveness of OSS-Based Licensing Services and HR Competency on Public Satisfaction: A Study in Badung Investment Department. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, *12*(5), 1907–1914. https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2860

Barry, E. S., Merkebu, J., & Varpio, L. (2022). State-of-the-art literature review methodology: A six-step approach for knowledge synthesis. *Perspectives on Medical Education*, *11*(5), 281–288. https://doi.org/10.1007/s40037-022-00725-9

Fahrudin, A. M., & Subandiyono, D. (2023). *TERAKREDITASI PERINGKAT 4, NO SK:200/M/KPT/2020 Pengaruh Protein dalam Pakan terhadap Efisiensi Pemanfaatan Pakan dan Pertumbuhan Juvenil Vaname (Litopenaeus vannamei) The Effect of Protein in Feed on Feed Utilization Efficiency and Growth of Juvenil Vaname (Litopenaeus vannamei)* (Vol. 1).

Fatimah, A. S. (2022). Online Single Submission (OSS) Based on E-Government Implementation in Micro Small Medium Business Licensing (MSMEs). *Journal of Governance*, *7*(4). https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.17703

Immaculata Yovita Adventy, M., Nengyanti, & Katriza Imania. (2024). Model Strategi Evaluasi Program Online Single Submission (OSS) Di Indonesia. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, *12*(2), 411–424. https://doi.org/10.30656/sawala.v12.i2.kpfn6722

Sukmawati, S., & Pujiningsih, S. (2022). IFRS Adoption Research in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal of Accounting and Investment*, *23*(1), 95–113. https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13280

Yusril, A. N., & Nurmiati, E. (2021). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*, *6*(2), 227–232. https://doi.org/10.33480/jitk.v6i2.1929